

PERAN LANTAMAL VIII MANADO GUNA MENJAGA KEAMANAN LAUT DAN MENDUKUNG TUGAS TNI AL

Jales Jamca Jayamahe, Marthin Luther, Manahan Budiarto Pandjaitan

Tim Peneliti LP2M Seskoal

Email: jales4094@gmail.com, marthinluther1997@gmail.com, pandjaitan2001@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v9i12.143>

Abstrak

Lantamal VIII Manado merupakan bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang melaksanakan penegakan hukum di laut. Permasalahan yang dihadapi oleh Lantamal VIII Manado adalah belum optimalnya kegiatan patroli keamanan laut di wilayah perbatasan akibat kondisi alutsista yang kurang dan belum optimal, dukungan anggaran dan fasilitas pangkalan yang terbatas, serta pola operasi yang kurang terkoordinasi antar Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI AL) di wilayah kerja Lantamal VIII Manado. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado dalam menjaga keamanan laut dan mendukung tugas TNI AL, 2) Menganalisis kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan Opskamla 3) Merumuskan strategi mengatasi kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan opskamla, 4) Merumuskan upaya mendukung pelaksanaan strategi mengatasi kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan opskamla. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi partisipatif, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian 1) Peran Lantamal VIII adalah bertanggung jawab menjaga keamanan di wilayah; penegakan hukum; mendukung tugas TNI AL dalam operasi militer di wilayah maritim; membangun kerja sama regional dengan negara-negara tetangga; 2) Kendala yang dihadapi Lantamal VIII seperti kondisi dan alutsista yang belum optimal, anggaran dan pangkalan yang terbatas, serta fasilitas perbekalan belum mempunyai tangki timbun dan hanya memiliki bekal kelas II 25 yaitu gudang kaporlap serta kelas IV yaitu gudang senjata; 3) Strategi mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dengan modernisasi teknologi; mempersiapkan kekuatan Lantamal, meningkatkan aspek kuantitas dengan meningkatkan jumlah alutsista, meningkatkan anggaran operasional, pola operasi dan kerja sama internasional; 4) Upaya mendukung strategi pelaksanaan adalah peningkatan sumber daya, kolaborasi dan koordinasi dalam membuat rencana turunan armada, peningkatan kemampuan personel, penggunaan teknologi dan sistem canggih, serta peningkatan kesadaran masyarakat, evaluasi dan peningkatan kebijakan.

Kata kunci : Peran, Keamanan Laut, Tugas TNI AL

Abstract

Lantamal VIII Manado is part of the Integrated Fleet Weapon System (SSAT) which carries out law enforcement at sea. The problem faced by Lantamal VIII Manado is that maritime security patrol activities are not yet optimal in the border area due to the condition of the defense equipment which is less and not optimal, budget support and base facilities are limited, and the pattern of operations that is not coordinated between TNI AL bases in the

working area of Lantamal VIII Manado . The aims of this study were 1) to analyze the role of the main TNI VIII Manado naval base in maintaining maritime security and to support the tasks of the Indonesian Navy, 2) to analyze the constraints of Lantamal VIII Manado in implementing opskamla 3) to formulate a strategy to overcome the obstacles of Lantamal VIII Manado in carrying out opskamla, 4) Formulate efforts to support the implementation of strategies to overcome obstacles Lantamal VIII Manado in carrying out opskamla. Descriptive qualitative research method with collection methods using various techniques, such as interviews, participatory observation, direct observation, and document analysis. Research results 1) The role of the Main Naval Base VIII is responsible for maintaining security in the region; law enforcement; support the duties of the Indonesian Navy in military operations in the maritime area; building regional cooperation with neighboring countries; 2) Obstacles faced by Lantamal VIII, such as conditions and defense equipment that are not yet optimal, limited budget and base, and supply facilities do not yet have stockpiling tanks and only have class II25 supplies, namely the chief of police warehouse and class IV, namely the weapons warehouse; 3) The strategy for overcoming these obstacles is to improve quality by modernizing technology; preparing Lantamal's strength, increasing the quantity aspect by increasing the number of Alutsista, increasing the operational budget, operational patterns and international cooperation; 4) Efforts to support the implementation strategy are increasing resources, collaboration and coordination in making detailed fleet reduction plans, increasing personnel capabilities, using advanced technology and systems, as well as increasing public awareness, evaluating and improving policies.

Keywords: *Role, Maritime Security, Duties of the Indonesian Navy*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas laut 6.400.000 km² dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 8.300.000 km² atau lebih dari 77% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Naibaho, 2022). Wilayah yang luas menyebabkan Indonesia memiliki garis batas yang didalamnya ditentukan oleh hukum internasional yang mengatur kedaulatan wilayah dan hak-hak negara di perairan teritorial. Potensi kerawanan sering terjadi akibat sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun udara (Damanik et al., 2023). Diperlukan

pertahanan keamanan yang kuat terutama keamanan maritim untuk mencegah invasi atau agresi dari pihak luar yang membahayakan kedaulatan negara.

Indonesia harus mempunyai kekuatan pertahanan laut yang handal untuk memperkuat posisi negara dan melindungi kepentingan nasional. Klaim teritorial dan sengketa maritim, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara oleh Negara Vietnam dan Malaysia sebagai bukti kekuatan pertahanan laut Indonesia harus ditingkatkan. Banyak kapal ikan yang masuk ke wilayah laut kedaulatan NKRI, seperti kapal ikan dari China, Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina. Mengingat melimpahnya sumber daya alam di laut Indonesia, hal ini

menjadi masalah yang harus segera diatasi. Ditambah dengan adanya isu yang memanas antara China dan Australia, akibat ulah AS-Inggris-Australia (Naibaho, 2022).

Manado, memiliki letak strategis di wilayah perairan Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Diberitakan dari portal digital (Mediaindonesia.com, 2021) mengenai banyaknya ancaman keamanan dan tindak kriminal khususnya di perbatasan wilayah laut pulau-pulau terluar Indonesia. Pengawasan pulau tak berpenghuni sebanyak 228 di wilayah Provinsi Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Marampit di Kepulauan Talaud, Pulau Marore di Kepulauan Sangihe, dan Pulau Miangas di Talaud. Kendala yang dialami yaitu kurangnya dukungan secara materiil serta personel dalam kegiatan operasional. Masih banyak pulau terluar yang belum ditempati satgas sesuai perintah dan anggaran. Patroli yang dilakukan masih terbatas dan kegiatan patroli yang terkadang menumpang kapal perahu masyarakat untuk menjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Kekuatan Kodim yang sangat kurang, sehingga bantuanpun turun dari batalyon dibawah kodam.

Patroli keamanan laut di wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh Lantamal VIII Manado dirasakan masih belum optimal akibat permasalahan yang dihadapi, dimana kondisi teknis Alutsista tersebut yang belum optimal serta jumlah

Alutsista yang ada masih kurang jika dibandingkan luas wilayah kerja dan ancaman yang dihadapi, dukungan anggaran yang terbatas dalam mendukung pelaksanaan operasi Kamla Lantamal VIII Manado dan dukungan fasilitas pangkalan TNI AL yang belum memadai untuk mendukung operasional dan perbaikan unsur di lapangan, serta pola operasi yang kurang terkoordinasi antar pangkalan TNI AL di wilayah kerja Lantamal VIII Manado tentunya memerlukan suatu strategi untuk memecahkan masalah tersebut dengan melibatkan seluruh komponen bangsa guna mendukung tugas TNI AL dalam menjaga keamanan perbatasan RI – Filipina.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam. Berfokus pada interpretasi makna, perspektif, dan konteks sosial. Pengumpulan dan analisis data bersifat deskriptif dan naratif, dengan mempertimbangkan aspek kualitatif seperti persepsi, keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman subjek penelitian. Metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi partisipatif, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *induktif* dan *interpretatif* untuk mengungkap pola, tema, dan *insight* yang muncul dari data tersebut (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang peran pangkalan utama TNI menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran dari pangkalan utama TNI oleh para informan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian dengan menggali pemahaman yang mendalam terkait perspektif dan makna yang terkandung didalamnya. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, gambaran, dan narasi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, luas dan terperinci tentang fenomena yang diteliti.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Lanal VIII Manado yang dikaitkan dengan kemampuan *support* TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan 5R, yaitu *Rebase* (pemangkalan), *Replenishment* (pembekalan), *Repair* (perbaikan), *Rest* (perawatan personel), *Recreation* (rekreasi).

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara maritim karena memiliki karakteristik geografis yang terdiri dari kepulauan yang luas dan garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang membentang sepanjang 5.120 kilometer dari Sabang sampai Merauke (Muhammad, 2017). Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah

seperti, ikan, kerang, rumput laut, dan mikroorganisme laut (Maleiku & Nurlela, 2022). Banyak sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkaitan erat dengan laut, sementara Industri perkapalan dan transportasi laut menjadi sektor perdagangan domestik dan internasional. Laut juga memiliki peran penting dalam pariwisata, energi, pertahanan, dan sumber daya negara.

Ancaman merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya situasi atau peristiwa yang merugikan atau membahayakan membahayakan kedaulatan negara, teritorial negara, dan keselamatan segenap bangsa (Listiyono et al., 2021). Ancaman keamanan tradisional (militer) yang dialami Indonesia adalah: 1) ketegangan Laut China Selatan (Umar & Naya, 2020); 2) Indonesia menghadapi ancaman terorisme (Mahendra et al., 2023). Ancaman keamanan non tradisional (nonmiliter) yang dialami Indonesia adalah: 1) pencurian sumber daya alam, seperti *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) (Agustin, et al., 2022). 2) Kejahatan Transnasional: Kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan pencucian uang merupakan ancaman nonmiliter yang melintasi batas negara dan mengganggu stabilitas sosial dan keamanan (Hermawan & Susanto, 2022). Perlunya peran TNI dalam mengatasi ancaman dan tantangan untuk menjaga keamanan dan pertahanan nasional Indonesia.

Kemampuan support TNI Angkatan Laut dikenal dengan fungsi '5R' yaitu *Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation*. Fungsi "5R" yang Anda sebutkan, yaitu *Rebase, Replenishment, Repair, Rest, dan Recreation*, merujuk pada kemampuan dukungan yang penting dalam operasi militer atau kegiatan yang melibatkan personel militer. Malau et al., 2021 menjelaskan tentang setiap fungsi tersebut yaitu *Rebase* atau pemangkalan mengacu pada kemampuan untuk memindahkan atau memindahkan personel, peralatan, dan sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih strategis atau lebih aman. *Replenishment* atau pembekalan sebagai kemampuan untuk mengisi ulang atau memperbaiki pasokan yang digunakan selama operasi. *Repair* atau perbaikan melibatkan kemampuan untuk memperbaiki atau memulihkan peralatan, kendaraan, senjata, dan sistem lain yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik selama operasi. *Rest* atau perawatan personel. Kebutuhan bagi personel militer untuk mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan fisik dan mental. Istirahat yang cukup diperlukan untuk menjaga kesehatan, kewaspadaan, dan kinerja personel dalam jangka panjang. *Recreation* atau rekreasi melibatkan kegiatan yang dirancang untuk memberikan relaksasi, hiburan, dan pemulihan psikologis kepada personel militer.

Peran global dalam kerja sama maritim adalah Indonesia berperan aktif dalam kerja sama maritim regional dan internasional. Indonesia adalah anggota ASEAN yang berfokus pada kerjasama maritim dan keamanan laut. Indonesia juga menjadi inisiatif regional seperti *Indian Ocean Rim Association (IORA)* DAN *Corak Triangle Initiative* yang berfokus pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Berikut peraturan perundang-undangan:

- a. UNCLOS (*United Nation Convention of The Law on The Sea*) 1982 Yang Telah Diratifikasi oleh Undang – Undang No. 17 Tahun 1985.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- d. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Kelas D Sei Pancang.
- e. Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- f. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Pangkalan-Pangkalan TNI Angkatan Laut.
- g. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut.
- h. PERPRES No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.
- i. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- j. Peraturan Panglima TNI Nomor 94 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tugas Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Konsep Keamanan Maritim (*maritime security*) mempunyai ikatan kepada 4 konsep yaitu; *national security* (keamanan nasional), *marine environment* (lingkungan laut), *economic development* (perkembangan ekonomi), serta *human security* (keamanan manusia) (Mahendra, et al., 2023).

Topik atau bahasan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan topik dari beberapa kajian sebelumnya, antara lain:

1. Peran TNI AL dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya

Mempertahankan Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keamanan Maritim.

Penelitian (Damanik et al., 2023) yang berjudul Peran TNI AL dalam pengamanan pulau terluar berhala upaya mempertahankan kedaulatan negara dalam perspektif keamanan maritim. Tulisan tersebut mengangkat permasalahan terkait pulau-pulau terluar yang rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Khususnya pulau di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berada di Selat Malaka. Berdasarkan temuan di atas, upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya perhatian dari Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai untuk memperketat pertahanan dan keamanan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengendalian dan komando sebagai wujud optimalisasi peran satgas TNI untuk melakukan pengamanan pulau terluar.

2. Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Penelitian Tanjung (2020) yang berjudul pengaruh kemampuan operasi keamanan laut pangkalan TNI Angkatan Laut terhadap penegakan hukum di laut. Tulisan tersebut mengangkat permasalahan terkait : 1) terbatasnya kemampuan personel, 2) jumlah sarana patroli terbatas, 3) luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL

personel pengawak yang tidak memadai, 4) cuaca ekstrem yang menyebabkan terganggunya aktivitas maritim, seperti badai, gelombang tinggi, kabut tebal, angin kencang, gelombang pasang. Berdasarkan temuan di atas, upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla).

3. Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bangka Belitung Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut di ALKI I.

Penelitian (Pandjaitan et al, 2019) yang berjudul peran pangkalan tentara nasional indonesia angkatan laut bangka belitung dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Tulisan tersebut mengangkat permasalahan terkait Pangkalan TNI AL Bangka Belitung kurang mendukung unsur KRI untuk melepaskan jangkarnya setelah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI-1 karena tidak adanya fasilitas docking, Lanal Bangka Belitung tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, sejak Januari 2019, Pangkalan TNI AL Bangka Belitung tidak lagi dapat mendukung logistik cairan (BBM) karena program pemerintah, yaitu membatasi penggunaan HSD dan menggantinya dengan B20 (Bio Solar), sedangkan

Pertamina Babel tidak termasuk dalam *Extended Receipt Map* (HSD). Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu dibangunnya pelabuhan khusus bagi TNI-AL dalam hal ini Lanal Bangka Belitung guna mendukung unsur/KRI/Kal untuk melaksanakan pengisian di Lanal Bangka Belitung, sehingga operasi pengamanan laut di ALKI I dapat berjalan dengan baik, segera melakukan pengisian ulang unsur/KRI/Kal di Lanal Bangka Belitung sehingga dapat mendukung operasi keamanan maritim dengan baik.

4. Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal* Fishing (Studi di Pangkalan TNI AL Nias).

Penelitian Zamili (2022) yang berjudul kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* (studi di pangkalan TNI AL Nias). Tulisan tersebut mengangkat permasalahan terkait penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, serta Tindakan *illegal fishing*. Upaya mengatasi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia yaitu: 1) Upaya *Pre-emptif* yang dilakukan TNI Angkatan Laut melakukan deteksi dini untuk memperkecil potensi pelanggaran, meningkatkan jaringan intelegen, memperkuat daya cegah dan daya tangkal, melakukan koordinasi lintas sektoral yaitu kepada instansi berwenang, 2) Upaya preventif melalui penyuluhan hukum terutama terkait dampak buruk *illegal fishing*, pelaksanaan patrol secara rutin, 3)

Upaya *Represif* adalah menindak pelaku kejahatan sesuai perbuatan yang telah dilanggar agar memberikan efek jera. Proses yang dilakukan TNI terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan adalah melakukan Tindakan penangkapan, pemeriksaan pelaku untuk menjatuhkan sanksi yang pada pelaku *illegal fishing*, dan terakhir penjatuhan hukuman oleh hakim kepada pelaku. Peran, kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok Lantamal akan dibahas secara mendalam sebagai berikut:

1. Peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado dalam Menjaga Keamanan Laut dan Mendukung Tugas TNI AL

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado didirikan pada tanggal 1 Januari 1974. Lantamal VIII Manado adalah salah satu pangkalan utama Angkatan Laut Indonesia yang terletak di Kota Manado, Sulawesi Utara. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan kedaulatan laut, melaksanakan operasi militer, melaksanakan latihan dan pelatihan, serta memberikan dukungan logistik kepada kapal-kapal Angkatan Laut di wilayahnya. Pangkalan ini memiliki fasilitas seperti dermaga, dok kapal, fasilitas pemeliharaan, fasilitas bahan bakar, dan markas komando yang mendukung operasional kapal-kapal dan personel Angkatan Laut.

Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P., CHRMP., (selaku Komandan Lantamal VIII Manado): Lantamal VIII merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Lantamal VIII dalam melaksanakan operasi keamanan laut, mengoperasikan unsur KAL Lantamal VIII dan berkoordinasi dengan Koarmada II menghadirkan unsur KRI untuk melaksanakan operasi di Wilayah Kerja Lantamal VIII (wawancara 19 Juni 2023).

Peran Lantamal VII Manado dalam menjaga keamanan laut dan mendukung tugas TNI AL adalah sebagai berikut:

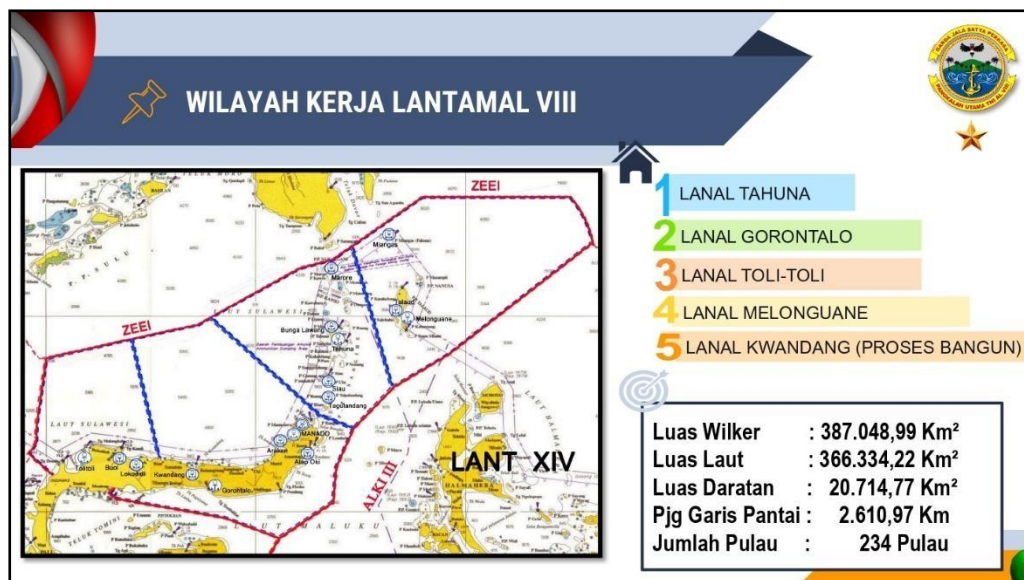
a. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Manado bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di wilayah laut dengan melakukan pengawasan secara ketat, untuk mencegah terjadinya ancaman seperti aktivitas legal, pelanggaran perbatasan dan merusak stabilitas wilayah. Lantamal VIII Manado juga melakukan bakti sosial di desa pesisir atau pulau-pulau atau kantong-kantong nelayan dan perkotaan wilayah kerja lantamal VIII, giat komsos terhadap nelayan, masyarakat, maritim dan warga negara desa binaan, laksanakan kegiatan ketahanan pangan, laksanakan Perdamaian dan pembinaan kampung Bahari Nusantara. Contoh kegiatan kosmos yang dapat dilakukan terhadap nelayan, masyarakat, maritim, dan warga negara desa binaan

adalah 1) mengadakan dialog dan diskusi dengan nelayan, masyarakat maupun warga

desa binaan untuk mendengarkan aspirasi kebutuhan, dan masalah yang dihadapi untuk merumuskan solusi bersama; 2) memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait keahlian menangkap ikan ataupun keterampilan lain yang relevan; 3) memberikan informasi terkait kebijakan maritim dan perlindungan lingkungan. Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI

Nouldy J. Tangka, S.A.P.,CHRMP., (selaku Komandan Lantamal VIII Manado):

“Penjagaan Keamanan wilayah laut dengan melakukan patroli dan pengawasan ketat di wilayah kerja Lantamal VIII beserta Lanal jajaran. Wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah Lanal Tahuna, Lanal Gorontalo, Lanal Toli-Toli, Lanal Kwandang (proses bangun)” (wawancara 19 Juni 2023).



Gambar 4.1 Wilayah Kerja Lantamal VIII Manado
Sumber: Laporan Komandan Danlantamal VIII Manado

b. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Manado juga berperan dalam penegakan hukum. Mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, untuk melawan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, atau aktivitas teroris di perairan regional. Hal ini membantu menjaga keamanan dan melindungi sumber daya laut.

Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka,

S.A.P.,CHRMP., (selaku Komandan Lantamal VIII Manado):

“Menegakkan hukum dalam melawan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, atau aktivitas teroris di perairan regional selain itu dilakukannya pemberdayaan potensi maritim di wilayah kerja Lantamal VIII ” (wawancara 19 Juni 2023).

c. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado mendukung tugas TNI AL dalam operasi militer di wilayah maritim. Mereka menyediakan fasilitas dan logistik untuk mendukung kegiatan TNI AL, termasuk perawatan dan pemeliharaan kapal perang, pemeliharaan fasilitas pangkalan, dan penyediaan dukungan lainnya. Dukungan ini memastikan bahwa TNI AL dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif. Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P.,CHRMP., (selaku Komandan Lantamal VIII Manado):

“Tugas Lantamal memberikan dukungan tempur, dukungan logistik, administrasi sebagai unsur TNI AL, serta dukungan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dan misi spesifik” (wawancara 19 Juni 2023).

Tugas Lantamal (Komando Armada Wilayah Laut) dalam konteks dukungan operasional TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) meliputi beberapa aspek, antara lain: 1) Dukungan Tempur; 2) Dukungan Logistik; 3) Dukungan Administrasi; 4) Dukungan Khusus;

Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP., (selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Menyediakan fasilitas logistik dalam mendukung kegiatan TNI AL, seperti melakukan perawatan dan pemeliharaan

kapal perang, pemeliharaan fasilitas pangkalan, dan penyediaan dukungan logistik lainnya. Harapannya tugas TNI dapat berjalan dengan efektif” (wawancara 19 Juni 2023).

d. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado juga berperan dalam membangun kerja sama regional dengan negara-negara tetangga. Melalui kerja sama ini, mereka dapat meningkatkan pertukaran informasi, melakukan latihan bersama, dan berbagi sumber daya untuk menghadapi ancaman bersama, seperti penangkapan ikan ilegal, perompakan, atau bencana alam di wilayah maritim.

Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP., (selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Membangun kerja sama regional dengan negara-negara tetangga untuk merumuskan cara menghadapi ancaman bersama seperti ikan ilegal, perompakan, atau bencana alam di wilayah maritim” (wawancara 19 Juni 2023).

2. Kendala Lantamal VIII Manado dalam Melaksanakan Opskamla

a. Kondisi Alutsista yang kurang optimal

Kondisi teknis dari alutsista Lantamal VIII Manado, mayoritas dalam keadaan siap, akan tetapi jika dilihat dari usia yang ada maka sebagian besar berusia tua. Kondisi Unsur KAL (Kapal Angkatan Laut) dan

Patkamla (Pengawasan dan Patroli Keamanan Laut) yang terbuat dari *fiberglass* dan sudah berusia di atas 10 tahun dapat menghadapi beberapa kendala, yaitu kapal *fiberglass* yang sudah tua mengalami penurunan performa dan kecepatan, dalam beberapa kasus, sistem navigasi, komunikasi, dan sensor mungkin tidak seoptimal kapal-kapal baru. Ini dapat membatasi kemampuan kapal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif di wilayah kerja Lantamal VIII akibat terbatasnya radius patroli hingga 3 mil dari garis pantai utama juga memiliki kendala dalam cakupan dan kemampuan pengawasan wilayah kerja Lantamal VIII.

Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP., (selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Mayoritas Alat alpung (Alpung) yang tidak dalam kondisi siap dikarenakan sudah berusia tua, atau mengalami kerusakan yang diakibatkan keterbatasan anggaran perbaikan dan kondisi spare part yang ada di wilayah tersebut. Kondisi unsur KAL dan Patmala dari Fiberglass yang sudah diatas 10 tahun memiliki radius patrol yang terbatas yaitu 3 mil dari garis pantai untuk mengkover wilayah kerja Lantamal VIII Manado” (wawancara 19 Juni 2023).

Tabel 4.1 Daftar Kondisi Teknis Alpung Lantamal VIII Manado

SATROL LANTAMAL VIII				
NO	ALPUNG	KONDISI	TAHUN	KERUSAKAN
1.	KRI PDG-801	S	1992	Nihil
2.	KRI KKP-801	S	1988	Nihil
3.	KAL TSL	S	2007	Nihil
4.	KAL TDN	S	2005	Nihil
5.	KAL PTL	S	2003	Nihil
6.	KAL SIAU	S	1996	Nihil
7.	PAT BUNAKEN (Jenis Combat boat Trimaran)	TS	2012	Gearbox MPK 1, 2 rusak, shaft propeller kanan bengkok
8.	PAT LEMBEH	TS	1996	Mesin volvo penta, pabrik sudah tidak memproduksi
9.	PAT MARORE	TS	1996	Mesin volvo penta, pabrik sudah tidak memproduksi
10.	PAT MIANGAS	ST	1996	Mesin tinggal 1, mesin volvo penta, pabrik sudah tidak memproduksi
11.	SEA RIDER	S	2016	Nihil

b. Jumlah Alutsista Lantamal VIII Manado yang Terbatas

Dalam melaksanakan Operasi keamanan laut di wilayah kerjanya, Lantamal VIII Manado memiliki unsur-unsur yang berada di Pangkalan-pangkalan di wilayah kerjanya serta satuan kerja di bawah komandonya, yaitu: Lanal Toli-toli, Lanal Tahuna, Lanal Melonguane, dan Satrol Lantamal VIII Manado. Unsur-unsur Patroli Lantamal VIII Manado meliputi, Patkamla 12 M, Combat boat, Kal 28 M, Kal 36 M, Kal 40 M, KRI tipe FPB 57 M. Jumlah alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang terbatas menyebabkan dampak: keterbatasan kemampuan tempur, keterbatasan pelaksanaan misi, rentan terhadap kerusakan atau kehilangan yang signifikan karena memerlukan sumber daya untuk memperbaiki dan menggantikan alutsista yang lebih besar, bergantung pada peralatan yang sudah tua atau usang, serta keterbatasan kemampuan pertahanan wilayah.

Tabel 4.2 Alpung Satrol Lantamal VIII Manado

SATROL LANTAMAL VIII	
NO	ALPUNG
1.	2 KRI FPB Kelas Pandrong
2.	1 Kal PC 40 M Kelas Weling
3.	2 Kal PC 36 M Kelas Anakonda
4.	1 Kal 28 M
5.	1 Combat Boat Kelas Trimaran
6.	3 Patkamla 12 M
7.	1 Sea Rhider (RHIB)

(Sumber: Lantamal VIII Manado, diolah oleh penulis)

Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP., (selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Jumlah Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang terbatas. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan patrol, keterbatasan deteksi dan monitoring serta keterbatasan merespon secara cepat permasalahan di lapangan” (wawancara 19 Juni 2023).

c. Dukungan Anggaran yang terbatas.

Peningkatan kemampuan dan kekuatan TNI AL sangat dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran. Sesuai dengan Rencana kerja 100 hari Kasal maka prioritas anggaran TNI AL akan di titik beratkan pada program tersebut (Adji, 2018). Salah satu komponen utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran pertahanan negara (Bakrie, 2007). Dimana terjadi keterkaitan antara Strategi pertahanan negara dengan anggaran yang tersedia, Selain postur dan struktur pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan negara dalam gelar kekuatan bersenjata. Pengembangan kekuatan TNI AL untuk dapat menangkal dan menindak setiap ancaman yang datang sangat bergantung pada jumlah anggaran yang dikeluarkan negara. Berikut penjelasan Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi

Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP.,
(selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Dukungan anggaran yang terbatas menyebabkan terbatasnya dan kurang optimalnya pelaksanaan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh pangkalan-pangkalan TNI AL, Khususnya Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan operasi Kamla di wilayah kerjanya yang berbatasan langsung dengan Filipina”
(wawancara 19 Juni 2023).

d. Terbatasnya kemampuan dukungan pangkalan.

Terbatasnya kemampuan dukungan pangkalan dalam Lantamal VIII Manado menyebabkan keterbatasan perawatan dan perbaikan pada alutsista dan infrastruktur, keterbatasan pengisian bahan bakar dan amunisi, keterbatasan fasilitas akomodasi personel, keterbatasan pelayanan medis dalam menghadapi situasi darurat, terbatasnya dukungan logistik, mulai dari makanan, air, suku cadang, dan peralatan lain yang diperlukan.

Kemampuan dukungan fasilitas pangkalan yang belum optimal. Dalam hal ini Kemampuan pangkalan mendukung 4R (*Repair, Replenishment, Rest and Recreation*) bagi unsur yang melaksanakan operasi.

e. Terbatasnya Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan).

Terbatasnya fasilitas pemeliharaan dan perbaikan memiliki dampak yang

signifikan yaitu penurunan kesiapan alutsista, peningkatan resiko kegagalan peralatan, keterbatasan dalam perbaikan mendesak, peningkatan biaya jangka panjang, karena pola perbaikan yang terbatas memungkinkan terjadinya kerusakan yang lebih serius, penurunan umur pakai peralatan karena pemeliharaan dan perbaikan yang terbatas.

Fasharkan bertugas untuk mengatasi kerusakan atau kedaruratan yang dialami oleh satuan operasional khususnya Patkamla, Kal dan KRI sehingga terwujudnya kemampuan dukungan dalam unsur operasional yang maksimal. Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi. M.Tr.Hanla., M.M., CTMP., (selaku Asops Lantamal VIII Manado):

“Pada Lantamal VIII/ Manado saat ini fasharkan yang ada di Lantamal VIII Manado terletak di kota Bitung dimana kemampuannya hanya dapat mendukung pemeliharaan dan perbaikan ringan unsur operasional sedangkan di Lanal Tahuna dan Lanal Melonguane dan Lanal Toli-toli belum memiliki fasharkan”
(wawancara 19 Juni 2023).

f. Fasilitas Perbekalan yang belum optimal.

Saat ini fasilitas perbekalan yang ada di Lantamal VIII belum memiliki fasilitas seperti tangki timbun dan hanya mempunyai pergudangan untuk bekal kelas II25 yaitu gudang kaporlap serta kelas IV yaitu gudang

senjata bagi Lantamal sendiri yang seharusnya mampu untuk menyimpan seluruh amunisi KRI.

g. Fasilitas Perawatan Personel yang Kurang Memadai.

Untuk saat ini Lantamal VIII, lanal Tahuna dan Lanal Melonguane, Lanal Tolitoli, memiliki fasilitas perawatan personel meliputi fasilitas pendukung personel pengawak dan fasilitas untuk personel unsur gelar operasi. Namun masih lengkap dimana belum mempunyai sarana latihan menembak laras panjang bagi anggota untuk menjaga profesionalisme sebagai prajurit TNI AL serta beberapa Lanal tidak mempunyai dokter, hanya BP dengan tenaga perawat dengan peralatan yang kurang lengkap.

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan personel, fasilitas perawatan yang tidak memadai menyebabkan resiko terjadinya penyebaran penyakit dan infeksi diantara personel, serta penyembuhan atau pemulihan personel yang sakit dan terluka berjalan dengan lambat.

h. Fasilitas Pembinaan Pangkalan yang Masih Kurang.

Pada fungsi dukungan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut, ditambahkan kemampuan fasilitas pembinaan pangkalan (fasbinlan) yang berkemampuan dukungan jaringan listrik, kendaraan dan motor. Fasbinlan pada semua Lanal di daerah operasi perbatasan sudah ada dan memadai. Terutama kendaraan tangki air tawar dan tangki angkut bahan bakar minyak.

Tabel 4.3 Fasilitas Pangkalan Pendukung Lantamal VIII Manado

No	Fasilitas	S	ST	TS
BITUNG				
1.	FASLABUH	S		
2.	FASHARKAN	S		
3.	FASBEK	S		
4.	FASBINLAN	S		
5.	FASWATPERS	S		
LANAL TOLI TOLI				
1.	FASLABUH		ST	
2.	FASHARKAN			TS
3.	FASBEK		ST	
4.	FASBINLAN		ST	
5.	FASWATPERS		ST	

LANAL TAHUNA				
1.	FASLABUH	S(U)		
2.	FASHARKAN			TS
3.	FASBEK		ST	
4.	FASBINLAN		ST	
5.	FASWATPERS		ST	
LANAL MELONGUANE				
1.	FASLABUH	S(U)		
2.	FASHARKAN			TS
3.	FASBEK			TS
4.	FASBINLAN		ST	
5.	FASWATPERS		ST	

(Sumber: Analisa Daerah Operasi Lantamal VIII/Manado, 2023)

i. Pola Operasi yang Kurang Terintegrasi.

Pola Operasi yang dilaksanakan selama ini adalah pola operasi yang tidak terintegrasi dan terkoordinasi antar Lanal-lanal di wilayah kerja Lantamal VIII Manado dengan Lantamal VIII manado sendiri, hal ini dibuktikan dimana seluruh KAL dan KRI yang berada dibawa pembinaan Lantamal VIII Manado keseluruhannya selalu berada di Bitung, tidak melaksanakan patroli sampai perbatasan laut Filipina. KAL Lantamal VIII Manado yang berukuran 36 M, 40 M dan KRI selama ini hanya berpatroli sampai Amurang, sehingga patroli keamanan laut yang dilaksanakan tidak optimal.

3. Strategi Mengatasi Kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan Opskamla.

a. Meningkatkan Aspek Kualitas

Gelar operasi Kamla di wilayah kerja yang berbatasan dengan Filipina dapat dilakukan dengan penangkalan dan penindakan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan dari dan atau lewat laut. 1) Meningkatkan Kondisi Teknis dan Jumlah Alutsista VIII Manado; 2) Modernisasi dengan meningkatkan kemutakhiran teknologi Alutsista termasuk KRI, KAL dan Patkamla, sehingga mampu memberikan dampak penangkalan serta penindakan terhadap niat melakukan pelanggaran. Peningkatan modernisasi dapat berupa sewaco dan permesinan; 3) Kesiapan (*Readdiness*). 4) Pelatihan dan Peningkatan Kapabilitas Personel; 5) Meningkatkan Pola Operasi; 6) Kerjasama Internasional.

b. Meningkatkan Aspek Kuantitas

Kebutuhan ideal adalah 5 (Lima) KRI untuk beroperasi atau hadir secara terus

menerus di wilayah kerja Lantamal VIII manado. untuk mengamankan seluruh perairan wilayah kerja Lantamal VIII manado diharapkan adanya peningkatan kuantitas KRI karena penambahan tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah saat ini dan disesuaikan juga dengan kebijakan *Minimum Essential Force* yang telah ditetapkan oleh pemimpin TNI AL dan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh negara. Berikut penjelasan Mayor Laut (P) Soni Wibisono, S.E., M.A.P. (selaku Komandan KRI Pandrong):

“Kapal Patroli Lantamal VIII melaksanakan operasi Kamla melakukan operasi 180 hari dengan wilayah kerja Lantamal VIII Manado seluas 141.310,818 Nm². (dihitung berdasarkan jari-jari luas strategi Lantamal VIII Manado yaitu 300 Nm)” (wawancara 22 Juni 2023).

4. Upaya Mendukung Pelaksanaan Strategi Mengatasi Kendala Lantamal VIII Manado Dalam Melaksanakan Opskamla

Dalam mendukung strategi pelaksanaan dan mengatasi kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan Opskamla, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. Peningkatan Sumber Daya: Upaya dapat dilakukan untuk mengadvokasi peningkatan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan peralatan, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

Opskamla dengan lebih efektif. Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Profidol Andre Mantiri Dotulung, M.Tr.Opsla (selaku Asintel Lantamal VIII Manado):

“Hal ini dapat melibatkan komunikasi yang kuat dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, untuk memperoleh dukungan dan alokasi yang memadai” (wawancara 21 Juni 2023).

b. Kolaborasi dan Koordinasi dalam Membuat Rencana Terinci turunan Armada II serta pembuatan RAB. Lantamal VIII/Manado dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian laut, lembaga penegak hukum, dan lembaga intelijen, untuk memperkuat kapabilitas dan membagi beban tugas. Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P., CHRMP., selaku Komandan Lantamal VIII Manado:

“Kolaborasi yang baik juga dapat meningkatkan pengumpulan informasi, pemantauan, dan penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal VIII, serta Membuat Rencana Terinci dari RO turunan dari Armada II dan Membuat pengajuan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke Komando Atas secara berjenjang dalam rangka mendukung unsur-unsur KRI, KAL dan Patkamla yang melaksanakan operasi di Wilayah kerja Lantamal VIII.” (wawancara 19 Juni 2023).

c. Peningkatan Kemampuan Personel. Upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan tugas Opskamla. Berikut penjelasan Mayor Laut (P) Soni Wibisono, S.E., M.A.P., (Selaku Komandan KRI Pandrong):

“Ini meliputi pelatihan rutin, peningkatan keahlian dalam bidang keamanan laut, pemahaman tentang aturan internasional, dan penggunaan teknologi terkini dalam pemantauan dan pengawasan perairan” (wawancara 22 Juni 2023).

d. Penggunaan Teknologi dan Sistem Canggih. Lantamal VIII Manado dapat memperbarui atau meningkatkan teknologi dan sistem yang digunakan untuk mendukung tugas Opskamla. Misalnya, memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan dengan memasang radar canggih, sensor, dan teknologi lainnya yang memungkinkan deteksi dan identifikasi yang lebih baik terhadap ancaman keamanan laut. Berikut penjelasan Mayor Laut (P) Soni Wibisono, S.E., M.A.P., (Selaku Komandan KRI Pandrong):

“Melaksanakan modernisasi fasilitas pangkalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan menyesuaikan anggaran dan skala prioritas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat,

pihak swasta dalam hal ini seluruh stakeholder industri strategis nasional yang berada di daerah sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dalam pelaksanaan dukungan pembangunan seluruh fasilitas pangkalan TNI AL secara bertahap” (wawancara 22 Juni 2023).

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Lantamal VIII Manado dapat melibatkan masyarakat dalam upaya keamanan laut. Berikut penjelasan Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P.,CHRMP., (selaku Komandan Lantamal VIII/Manado):

“Dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya perlindungan sumber daya laut, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan mendukung upaya penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, dialog dengan komunitas lokal, dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.” (wawancara 19 Juni 2023).

f. Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan. Lantamal VIII Manado dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dalam melaksanakan Opskamla. Berikut penjelasan Kolonel Laut (P) Profidol Andre Mantiri Dotulung, M.Tr.Opsla, selaku Asintel Lantamal VIII Manado:

“Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kendala yang ada, sehingga dapat dilakukan

perbaikan dan peningkatan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas Opskamla. Evaluasi juga dapat dilakukan Lantamal VIII Manado melaksanakan record data dan melaporkan ke komando atas tentang kondisi Alutsista yang ada, sehingga mendapatkan perhatian terhadap kondisi alutsista yang sudah tua dan mengalami kerusakan, Memonitor dan melaksanakan operasi di daerah rawan pelanggaran hukum di perbatasan berdasarkan analisa intelijen” (wawancara 21 Juni 2023).

KESIMPULAN

Peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado dalam menjaga keamanan laut dan mendukung tugas TNI AL adalah 1) bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di wilayah laut dengan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ancaman seperti aktivitas legal, pelanggaran perbatasan dan merusak stabilitas wilayah; 2) berperan dalam penegakan hukum; 3) mendukung tugas TNI AL dalam operasi militer di wilayah maritim, dan memberikan dukungan tempur, logistik, administrasi, dan dukungan khusus; 4) membangun kerja sama regional dengan negara-negara tetangga.

Kendala Lantamal VIII dalam melaksanakan Opskamla adalah 1) kondisi alutsista yang kurang optimal, karena sebagian besar berusia tua, 2) jumlah alutsista Lantamal VIII yang terbatas

menyebabkan keterbatasan patrol, keterbatasan deteksi dan monitoring serta keterbatasan merespon secara cepat permasalahan di lapangan; 3) dukungan anggaran yang terbatas. Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran TNI AL sampai saat ini masih sangat terbatas dan berdampak pada penyelenggaraan operasi-operasi yang digelar oleh TNI AL; 4) Terbatasnya kemampuan dukungan pangkalan; 5) fasilitas seperti tangki timbun dan pergudangan di beberapa lantal masih terbatas; 6) pola operasi yang tidak terintegrasi dengan lantal-lantal di wilayah kerja Lantamal VIII Manado.

Strategi mengatasi kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan Opskamla adalah 1) Meningkatkan aspek kualitas adalah modernisasi dengan meningkatkan kemutakhiran teknologi Alutsista, mempersiapkan kekuatan Lantamal VIII Manado, pelatihan dan peningkatan kapabilitas personel, 2) meningkatkan aspek kuantitas seperti menentukan jumlah Alutsista dan meningkatkan jumlah Alutsista, meningkatkan anggaran operasional, meningkatkan keterlibatan dukungan pangkalan TNI AL , meningkatkan pola operasi, melakukan kerja sama internasional.

Upaya dalam mendukung strategi pelaksanaan mengatasi kendala Lantamal VIII Manado dalam melaksanakan

Opskamla adalah 1) melakukan peningkatan sumber daya, 2) kolaborasi dan koordinasi dalam membuat rencana turunan armada II serta pembuatan RAB, 3) peningkatan kemampuan personel dengan Latihan rutin, 4) penggunaan teknologi dan sistem yang canggih dengan memperbarui dan meningkatkan teknologi dalam sistem Opskamla, seperti memasang radar canggih, sensor, dan teknologi lainnya, 5) peningkatan kesadaran masyarakat mereka tentang pentingnya perlindungan sumber daya laut, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan mendukung upaya penegakan hukum, 6) evaluasi dan peningkatan kebijakan Lantamal VIII Manado.

Rekomendasi kepada Pemimpin TNI AL maupun Komandan Lantamal VIII Manado sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang yaitu dalam rangka memperkuat peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, diperlukan peningkatan anggaran yang memadai untuk memperoleh sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang diperlukan. Agar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualifikasi personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado melalui pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ini, seperti TNI AL,

pemerintah daerah, lembaga penegak hukum dan masyarakat setempat. Diskusikan secara terbuka dan berkelanjutan untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga keamanan serta pemerintah luar negeri untuk meningkatkan keamanan laut dan mendukung tugas TNI AL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, S.S. (2018). *Buku Panduan 100 Hari kerja KASAL*. Jakarta: Masebal.
- Bakrie, C.R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage handbook of qualitative research*: Sage Publications.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* . Arizona State University: Sage.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* . (n.p): UNIGRES PRESS.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Penganta

r_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Informan+adalah+individu+atau+kelompok+yang+memberikan+informasi&pg=PA150&printsec=frontcover.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kasal Nomor 1424, 2016. Kep.Kasal Nomor KEP/1424/V/2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Kebijakan Perencanaan TNI Angkatan Laut Tahun 2017. Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Pangkalan-Pangkalan TNI Angkatan Laut.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Kelas D Sei Pancang.

Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Panglima TNI Nomor 94 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tugas Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Perkasal No 5 Tahun 2016 tentang kebijakan dasar pembangunan TNI AL menuju kekuatan pokok Minimum (MEF)

PERPRES No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku *Illegal fishing*. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32-41.

Ahmadi, A., Herdiawan, D., & Suharyo, O. S. (2020). Analisa Strategi Pemberdayaan Komponen Maritim dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut Nasional. *Rekayasa*, 13(1), 38-44.

Damanik, C., Suwarno, P., Asih, B., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Peran TNI AL dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 263-275.

Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan

- Laut. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 363-371.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(3).
- Mahendra, R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2023). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204-212.
- Malau, M. S., Subagyo, H., & Yusworo, H. (2021). Optimalisasi Pangkalan Utama Tni Angkatan Laut I Belawan Guna Menjamin Keamanan Laut Di Selat Malaka. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 171-186.
- Maleiku, M. Y., & Nurlela, M. (2022). Hasil Laut dan Kehidupan Nelayan Pulau Pura Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 6(2), 55-62.
- Muhammad, M. M. (2017). Perancangan Atlas Warisan Budaya Indonesia Untuk Media Pembelajaran Anak Di Sekolah Dasar (*Doctoral dissertation*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Naibaho, D. Y. S. M. (2022). Marine Defense Strategy With Military Base Development on the Outside Island As a Leading Defense and Defense Mobility. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 8(1), 74-80.
- Pandjaitan, M. B., Suwarno, P., & Gunardi, G. (2019). Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bangka Belitung Dalam Mendukung Operasi Keamanan Laut di ALKI I. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(3), 21-30.
- Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia sebagai middle power: strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 146-163.
- Tanjung, A. P. (2020). Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).
- Umar, H., & Naya, C. G. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemoni China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016–2019. *Ilmu dan Budaya*, 41(71).
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam

Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286-298.

Zamili, P. A. S. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 191-203.

Sumber Online

Kompas.com. (2023). Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya>. Diakses 4 Juli 2023.

Media Indonesia. (2021). Komisi I DPR Soroti Ancaman Keamanan Pulau-Pulau Terluar Sulut. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439295/komisi-i-dpr-soroti-ancaman-keamanan-pulau-pulau-terluar-sulut>. Diakses tanggal 1 Juli 2023.

Nusantara Maritime News. (2023). <https://nusantamaritimeneews.id/berita/fasilitas-pelabuhan-tahuna-asih-terbatas/>. Diakses 9 Juli 2023.

Voaindonesia.com. 2023. China Kesepakatan Pangkalan Militer Filipina. <https://www.voaindonesia.com/a/china-kesepakatan-pangkalan-militer-filipina-as-bahayakan-perdamaian-regional/7035805.html>. Diakses 26 Juni 2023.